



P U T U S A N

Nomor: 675/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA, diwakili
LEONARD SOEDHARMA Jabatan Direktur, berkedudukan Jl.
MT. Haryono No. 760-762, Ruko Karang Turi Blok N, Semarang.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SETYANTO DHARMA**
PRANA, pekerjaan Kepala Pembukuan, beralamat di Kp. Gutitan
21 Semarang, sesuai surat kuasa khusus tanggal 20 September
2010.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL BEA dan CUKAI, beralamat di Jl.
Jenderal Ahmad Yani-By Pass, Jakarta.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan
Pengadilan Pajak tanggal 25 Pebruari 2010 No. Putusan 22346/ PP/
M.XIV/19/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita
perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Penetapan Kepala
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas
seperti dimaksud pada :

Surat : Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1514/BC.8/2008 tanggal
17 Maret 2008;

Tentang : Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap
SPKPBM Nomor : S-000362/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008
tanggal 21 Januari 2008 oleh Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas;

Hal 1 dari 17 hal. Put. No. 675/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Terbanding tersebut di atas menetapkan penolakan keberatan Pemohon Banding terhadap nilai pabean dan pembebanan bea masuk sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa alasan mengajukan banding tersebut di atas adalah benar nilai pabean untuk PIB Nomor : 001274 tanggal 15 Januari 2008 adalah sebesar CIF USD 8,211.15 dan pembebanan bea masuk Hammer (9 jenis Barang), sesuai PIB, negara asal China;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Pebruari 2010 No. Putusan 22346/PP/M.XIV/19/2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1514/BC.8/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-000362/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 21 Januari 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP : 01.985.563.4-511.000, alamat : Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan mempertahankan nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding sesuai keputusan Nomor : KEP-1514/BC.8/2008 tanggal 17 Maret 2008 sebesar CIF USD 11,458.90 sehingga Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sesuai SPKPBM Nomor : S-000362/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 16.566.702,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Pebruari 2010 No. Putusan 22346/PP/M.XIV/19/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 19 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 September 2010, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-862/SP.52/AB/IX/2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 September 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 8 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Nopember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Pengguguran Nilai Transaksi (Metode I) oleh Termohon;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menolak nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 001274 tanggal 15 Januari 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007. Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean.
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau.
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi:

Bahwa Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah pabean, dari kriteria ini dapat kami jelaskan

Hal 3 dari 17 hal. Put. No. 675/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang yang kami impor kami bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini ;

- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :
 - (1) Diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean.
 - (2) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan.

- (3) Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial.

dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan atas impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 001274 tanggal 15 Januari 2008 jenis barang Hammer negara asal China sebesar CIF USD 8,211.15, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena ;

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut.

Pasal 7 huruf c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau.

Pasal 7 huruf d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi:

Berdasarkan ketentuan huruf c dan huruf d, di atas Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan data-data yang obyektif dan terukur untuk menolak/menggugurkan nilai transaksi, yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, sehingga hal ini kami katakan, bahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali, merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;

dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan kembali bahwa ;

- Termohon Peninjauan Kembali telah menolak nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" :

Hal 5 dari 17 hal. Put. No. 675/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya penolakan pemberitahuan nilai transaksi dari Pemohon Banding oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sah.

2. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali atas penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor : KEP-1514/BC.8/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S-000362/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 21 Januari 2008, atas nama: PT. Suryasemarang Sukses Jayatama dalam menetapkan nilai pabean tidak memberikan alasan atau metode yang digunakan untuk penetapan, oleh karena itu dapat kami katakan bahwa Penetapan nilai pabean oleh Termohon tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa karena Termohon tidak memberitahukan Metode Penetapan Nilai Pabean yang mereka gunakan untuk menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor : 001274 tanggal 15 Januari 2008, maka kami coba untuk mengemukakan Ketentuan Metode Penetapan Barang Impor sebagai berikut;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007,

ayat (2) Nilai Pabean untuk menghitung bea masuk ditetapkan dengan menggunakan satu dari enam metode penetapan sebagai berikut :

- a. Metode I Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan;
- b. Metode II Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang Identik
- c. Metode III Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa
- d. Metode IV Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode deduksi
- e. Metode V Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode Komputasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Metode VI Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi berdasarkan tatacara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan pasal VII GATT 1994 berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu;

Bahwa karena Termohon dalam menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor : 001274 tanggal 15 Januari 2008 tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam penetapan nilai pabean nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal Pasal 91 huruf e, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan lagi bahwa ; Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas dan tidak terukur dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 001274 tanggal 15 Januari 2008, tidak sah;

Bahwa karena penolakan/pengguguran nilai transaksi dan penetapan nilai pabean yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 001274 tanggal 15 Januari 2008, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1514/BC.8/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPB Nomor: S-000362/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 21 Januari 2008. atas nama: PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP: 01.985.563.4-511.000, alamat: Jl. MT. Haryono No.760-762 Ruko Karang Turi Blok N. Semarang menjadi tidak sah.

FAKTA-FAKTA YANG ADA DALAM PUTUSAN BANDING

Hal 7 dari 17 hal. Put. No. 675/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 22346/PP/M.XIV/19/2010, diketahui bahwa Termohon Tidak Pernah hadir dalam Persidangan banding;

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam keputusannya Nomor ; 22346/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 22 Januari 2009. Diucapkan hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2010, menyatakan antara lain sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan:

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC72007 tanggal 1 Maret 2007, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean:

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007. Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean.
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor : 001274



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2008 sebesar CIF USD 8,211.15. adalah nilai transaksi yang sebenarnya:

Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan Surat Uraian Banding, maka Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

Bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

Bahwa memenuhi permintaan Majelis Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa :

1. Purchasing Order Nomor : 273/IDP-SSJ/X/2007 tanggal 13 Nopember 2007.
- . Sales Confirmation Nomor: 2007009-1 tanggal 23 Nopember 2007.
- . Invoice Nomor: 2007009-1 tanggal 10 Desember 2007.
- . Packing List Nomor : 2007009-1 tanggal 10 Desember 2007.
- . Bill Of Lading Nomor: KKLUTAO103908 tanggal 20 Desember 2007.
- . Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor : MC-0407.5502.
- . PIB Nomor: 001274 tanggal 15 Januari 2008.
- . Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal Nomor: 002292/ WBC.06/KP.0103/2008 tanggal 23 Januari 2008,
- . Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 16 Januari 2008.
- . Rekening Koran Bank Niaga periode 4 Januari - 31 Januari 2008.
11. Buku Kas Besar Januari 2008.
- . Buku Bank.
- . Buku Besar Utang Dagang.
14. Kartu Stock.
15. Surat Linyi Yiming Machinery & Tools Making Co.,. Ltd.

Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada pemasok Linyi Yiming Machinery & Tools Making Co.Ltd China dengan menggunakan Purchasing Order Nomor : 273/IDP-SSJ/X/2007 tanggal 13 Nopember 2007 dengan perincian jenis barang sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (USD)
"FUKUDA" BRAND BALL PEIN HAMMER WITH FIBRE			

Hal 9 dari 17 hal. Put. No. 675/B/PK/PJK/2011



MIRROR CLASS HANDLE			.00
/2 LB	2.250		.50
/4 LB	.750		.50
.5 LB	.750		
"FUKUDA" BRAND BALL			
PEIN HAMMER W/WOODEN			
MIRROR HANDLE			.350.00
/2 LB	.250		.650.00
/4 LB	.750		
"FUKUDA" BRAND CHIPPING			
HAMMER W/WOODEN			
MIRROR HANDLE			.00
G	.550		.00
G	.150		
"FUKUDA" BRAND CLAW			
HAMMER W/WOODEN			
MIRROR HANDLE			.25
OZ	.150		1.446.90
500 G	.650		
	CNF Semarang		8.211,15

Bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak Supplier Linyi Yiming Machinery & Tools Making Co,Ltd, China yaitu membuat Sales Confirmation Nomor: 2007009-1 tanggal 23 Nopember 2007, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (USD)
"FUKUDA" BRAND BALL			
PEIN HAMMER WITH FIBRE			
MIRROR CLASS HANDLE			.00
/2 LB		.250	.50



/4 LB		.750	.50
.5 LB		.750	
"FUKUDA" BRAND BALL PEIN HAMMER W/WOODEN MIRROR HANDLE			.350.00
/2 LB		.250	.650.00
/4 LB		.750	
"FUKUDA" BRAND CHIPPING HAMMER W/WOODEN MIRROR HANDLE			.00
G		.550	.00
G		.150	
"FUKUDA" BRAND CLAW HAMMER W/WOODEN MIRROR HANDLE			.25
OZ		.150	.446.90
G		.650	
CNF Semarang			8.211,15

Term of Payment : T/T

Bahwa pihak Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill Of Lading Nomor: KKLUTAO103908 tanggal 20 Desember 2007 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Linyi Yiming Machinery & Tools Making Co.Ltd.
China

Consignee : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama.

Port of Loading : Qingdao

Port of Discharge : Semarang,

Description of Goods : Hammer with Fibre Mirror

Gross Weight : 17,900.00 kgs;

Bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Invoice Nomor: 2007009-1 tanggal 10 Desember 2007 dan Packing List Nomor : 2007009-1 tanggal 10 Desember 2007 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 8,211.15;

Bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor : MC-0408.5502 untuk Commercial Invoice Nomor: 2007009-1 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 dan dengan Bill Of Lading Nomor: KKLUTAO103908 tanggal 20 Desember 2007 ;

Bahwa barang impor berupa Galvanized Welded Wire Mesh (7 Jenis barang) dengan Bill Of Lading Nomor: KKLUTAO103908 tanggal 20 Desember 2007. Invoice Nomor: 2007009-1 tanggal 10 Desember 2007, dan Packing List Nomor : 2007009-1 tanggal 10 Desember 2007 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 001274 tanggal 15 Januari 2008 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 8,211.15:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 001274 tanggal 15 Januari 2008 adalah dari Linyi Yiming Machinery & Tools Making Co.Ltd.China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD 8,211.15; telah sesuai dengan Invoice Nomor: 2007009-1 tanggal 10 Desember 2007. Packing List Nomor : 2007009-1 tanggal 10 Desember 2007. dan Bill Of Lading Nomor: KKLUTAO103908 tanggal 20 Desember 2007;

Bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: 2007009-1 tanggal 10 Desember 2007 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Transfer Bank Niaga tanggal 16 Januari 2008 dan bukti Rekening Koran Bank Niaga tanggal 03 Januari 2008, dan telah dimasukkan dalam Kartu Stok tanggal 24 Januari 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 16 Januari 2008, Buku Bank tanggal 16 Januari 2008. serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 24 Januari 2008;

Bahwa "*best practices*" dalam melaksanakan ketentuan Article 17 dan *Ministrial Decision 6.1* tersebut di atas. sebagaimana diuraikan dalam:

- *World Customs Organization (WCO) Handbook of Customs Valuation Control,*
- *WCO Technical Committee on Customs Valuation Intruments. Case Study 13.1. atau*
- *ASEAN Customs Valuation Guide,*

digunakan parameter "harga pembanding" untuk menguji apakah "*the declared value is realistic in the light of the commercial practices of industry and identical or similar goods*"

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah adalah sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas. Majelis berkesimpulan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan dan menolak permohonan banding Pemohon Banding: Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 22346/ PP/ M.XIV/19/2010, diketahui bahwa Termohon Tidak Pernah hadir dalam Persidangan banding;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga Termohon *tidak dapat menjelaskan metode* yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 001274 tanggal 15 Januari 2008;

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membenarkan alasan yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali untuk menggugurkan harga transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor: 001274 tanggal 15 Januari 2008 untuk barang berupa Hammer (9 jenis barang) dari China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD 8,211.15 terlalu rendah: dan kemudian Termohon menetapkan ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 12,832.11. dapat kami kemukakan kembali secara singkat sebagai berikut :

Bahwa dari Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean
dari kreteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor kami, bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku.jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini.;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor; KEP-81/BC71999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Hal 13 dari 17 hal. Put. No. 675/B/PK/PJK/2011



Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :
 - (i) diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean.
 - (ii) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan .
 - (iii) Tidak mempengaruhi harga barang secara substantial .

dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan terhadap impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 001274 tanggal 15 Januari 2008 jenis barang berupa Abrasive Paper dari China sebesar CIF USD 8,211.15 telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena;

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut.

Pasal 7 ayat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi:

dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 001274 tanggal 15 Januari 2008 sebesar CIF USD 8,211.15 adalah harga yang sebenarnya sebagaimana telah kami jelaskan diatas akan tetapi harga tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali dan oleh Termohon nilai transaksi tersebut ditambah sehingga menjadi sebesar CIF USD 12,832.11 tanpa data yang obyektif dan terukur untuk masing-masing barang, dan tanpa metode penetapan yang jelas, dengan demikian penetapan nilai pabean yang ditetapkan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak syah;

Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya membenarkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali padahal Keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut ditetapkan tanpa data yang obyektif dan tidak berdasarkan metode penetapan nilai pabean, sehingga keputusan Termohon Nomor : KEP-1514/BC.8/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S-000362/SPKPN/WRC.06/KP.01/2008 tanggal 21 Januari 2008 tidak syah ;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Pajak merujuk pada putusan Termohon yang tidak syah maka putusan Pengadilan Pajak tersebut juga menjadi tidak syah:

Bahwa sebagai bukti kebenaran nilai transaksi yang kami beritahukan, kami telah menyerahkan bukti-bukti tersebut diatas baik yang asli maupun foto kopinya kepada Majelis Hakim Pajak dan telah diperiksa dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ;

Bahwa dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pajak telah diuraikan pula bukti-bukti transaksi yang kami lakukan yang kurang lebih sebagai berikut : bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: 2007009-1 tanggal 10 Desember 2007 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Transfer Bank Niaga tanggal 16 Januari 2008 dan bukti

Hal 15 dari 17 hal. Put. No. 675/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran Bank Niaga tanggal 16 Januari 2008, dan telah dimasukkan dalam Kartu Stok tanggal 24 Januari 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 16 Januari 2008. Buku Bank tanggal 03 Januari 2008, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 16 Januari 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-undang No. 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB terlalu rendah dan tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Senin, Tanggal 9 April 2012 oleh Widayatno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH dan DR. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim –Hakim Anggota :

ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH
ttd.
DR. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS

K e t u a :

ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti :

ttd.
Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	Rp. 2.489.000,-
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitia
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754